

Perubahan peran dan fungsi benteng dalam tata ruang kota¹

DJOKO MARIHANDONO

ABSTRACT

This research aims to explain and describe the colonial history of fortresses and their influence on the development of urban planning in Indonesia. The fortresses functioned as centres of colonial administration and control. In former days these fortresses were identified with the domination of power, economic exploitation and as symbols of foreign rule in areas ruled by local kings and entrepreneurs. Due to political and economic changes as well as in town planning, the function of these fortresses also changed. At present, the fortresses function as heritage sites and interesting places to be visited by tourists. The current efforts to conserve these historical sites can have an effect on urban development planning. The Indonesian government, especially the Department of Tourism and Culture, should give much attention not only for preservation but also for restoration of these sites.

KEYWORDS

Benteng (*fortress*), VOC, perencanaan kota (*urban planning*).

Istilah ‘benteng’ mengingatkan kita pada suatu konteks pertahanan dan peperangan, khususnya yang terjadi pada masa lalu. Konotasi ini memiliki makna yang ternyata lebih luas daripada arti sebenarnya ketika mempelajari sejarah pertumbuhan dan perkembangan kota di Indonesia. Benteng dalam konteks tata ruang kota di Indonesia memegang peranan penting. Bahkan ada dugaan bahwa beberapa kota di Indonesia menjadi tumbuh dan berkembang dengan bangunan benteng sebagai sentralnya.

¹ Makalah yang telah mengalami sedikit penyesuaian ini pernah disajikan dalam Seminar Kebudayaan Maritim yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin, Makassar pada tanggal 26 - 28 Oktober 2007.

DJOKO MARIHANDONO adalah pengajar pada Program Studi Prancis, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia; menyelesaikan Program Doktor di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia pada tahun 2005 dengan disertasi berjudul “Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1800-1811”. Minat penelitian utama di bidang Sejarah Eropa, khususnya Belanda dan Prancis dalam hubungannya dengan wilayah koloni di Hindia Timur. E-mail: djoko_maribandono@yahoo.com

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika terjadi pembagian tipe kota. Pembagian ini bisa didasarkan pada dikotomi geografis (pantai dan pedalaman), tipologi budaya (maritim dan agraris), atau administratif (pusat kekuasaan dan daerah taklukan atau vasal). Masing-masing kota tumbuh dan berkembang sesuai dengan corak dan budayanya. Dengan menempatkan benteng dalam konteks perkembangan kota apapun tipologinya, suatu bangunan yang pada mulanya terbatas pada fungsi sebagai sarana pertahanan ini kemudian mengalami perubahan peran dan fungsi seiring dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan kota tersebut.

Sesuai tujuan pembangunannya, benteng memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Dengan banyak dan beragamnya individu yang tinggal di dalam benteng, dinamika kehidupan menjadi kompleks. Bersamaan dengan itu, benteng tidak lagi menjadi simbol pertahanan tetapi juga menjadi pusat aktivitas dan interaksi sosial manusia. Berbagai macam kegiatan dilaksanakan bukan hanya terbatas pada aktivitas peperangan atau yang berkaitan dengan militer, melainkan juga dengan cabang kehidupan manusia lainnya termasuk aspek ekonomi dan budaya. Hal ini mempengaruhi benteng yang bukan lagi melambangkan institusi militer dan peperangan melainkan menjadi pusat kehidupan sosial dan akhirnya berkembang menjadi pusat administrasi dan pemerintahan.²

Fungsi benteng yang kemudian bergeser dari institusi keamanan menjadi institusi pemerintahan terjadi ketika benteng dikelola oleh sekelompok orang yang terorganisir dalam suatu lembaga khusus, dengan wewenang politik dan ekonomi. Lembaga tersebut memiliki sistem administrasi, hirarki yang terwujud dalam birokrasi, korps yang menopang status dan wewenangnya, kekuasaan politik untuk mengambil keputusan, membuat dan melaksanakan peraturan, serta menguasai fasilitas keuangan yang memadai untuk mencukupi kebutuhannya.

Bentuk pergeseran fungsi ini terjadi pada benteng-benteng yang dibangun dan digunakan oleh lembaga-lembaga dagang masa lalu yang memiliki kekuasaan dari negara induknya. Lembaga-lembaga ini memiliki wewenang dan dukungan kekuatan bukan hanya untuk melakukan transaksi niaga tetapi juga untuk membangun suatu pangkalan dan mengkoordinasikan semua pangkalan yang dibangunnya sehingga berbentuk suatu jaringan dan kolonisasi. Hal tersebut dilaksanakan oleh VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) dan EIC (East India Company) di Asia pada abad 17-18 dengan hak-hak politik dan ekonomi yang bersifat monopoli dari negara induknya.³

Benteng bagi lembaga-lembaga perdagangan masa lalu menjadi kebutuhan primer di samping modal dagang mereka. Dengan benteng, VOC dan EIC tidak hanya digunakan untuk mengkoordinasikan semua aktivitas dan menjalankan segala urusannya. Benteng juga digunakan sebagai simbol kekuatan mereka yang digunakan sebagai ancaman terhadap lawan-lawannya

² Merrillees 2000: 22. Karena padat dan kompleksnya aktivitas ini, sering benteng itu disamakan dengan istilah "kota bertembok".

³ Harrison 1954: 89.

ketika mereka menghadapi kesulitan untuk mewujudkan maksud-maksud ekonominya. Bangunan tersebut kemudian juga mengalami perkembangan fungsi ketika dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan administrasi yang mengatur wilayah kekuasaan badan-badan usaha ini. Akibatnya, benteng menjadi simbol penguasaan wilayah baik secara politik, ekonomi maupun militer. Benteng kemudian identik dengan dominasi kekuasaan, eksploitasi ekonomi dan simbol kekuasaan asing di suatu daerah yang dikuasai oleh raja-raja dan penguasa pribumi.⁴

Dalam artikel ini akan disajikan deskripsi tiga benteng yang dipilih sebagai bentuk tipologi dari semua benteng yang ditinggalkan oleh para penguasa asing di Indonesia. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan lokasi geografis tempat pembangunannya dan lembaga yang mendirikan bangunan itu. Mengingat ketiganya memiliki fungsi umum benteng seperti di atas, pembagian berdasarkan fungsi dan manfaat benteng tidak akan dibahas. Ketika dibuat generalisasi, fungsi ketiganya tetap sama walaupun dalam kasus perkembangannya, masing-masing akan tergantung pada konteks lokalitas tempat benteng itu berada. Dua benteng yang dipilih didirikan di tepi perairan yang cenderung berfungsi dalam konteks kehidupan maritim. Sementara satu benteng yang diteliti di sini berdiri di pedalaman atau di darat yang cenderung berkaitan dengan konteks budaya agraris.

1 FORT VREDEBURG DI YOGYAKARTA

Benteng di kota Yogyakarta yang sekarang terletak di depan kantor pos Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di ujung jalan Malioboro disebut benteng Vredeburg.



Gambar 1. Foto Benteng Vredeburg dilihat dari depan dan dari samping. Foto koleksi KITLV (www.kitlv.nl nomor foto 5914 dan 29221).

⁴ Gill 1995: 59-60.

Benteng ini merupakan peninggalan dari abad ke-18 dan merupakan hasil bangunan VOC. Benteng ini didirikan tidak lama setelah berdirinya Kesultanan Yogyakarta sebagai hasil dari perjanjian Giyanti pada tahun 1755.⁵ Setelah mendapatkan tanah dan izin dari Sultan Hamengku Buwono I, Residen Cohen Donkel yang pertama kali ditempatkan di Yogyakarta melaksanakan pembangunan benteng ini pada tahun 1760. Alasan pembangunan benteng ini disampaikan kepada Sultan Hamengku Buwono I, yaitu untuk menempatkan pasukan VOC dengan tujuan melindungi Sultan HB I dan keluarganya beserta kompleks kraton Yogyakarta dari serangan musuh.

Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Sultan HB I dan Cohen Donkel, Kesultanan Yogyakarta akan menyediakan kayu dan tenaga kerja. Kompeni akan memberikan ganti rugi atas kayu yang disetorkan dengan nilai yang ditetapkan sebelumnya, sementara tenaga kerja akan melakukan pekerjaan menurut sistem kerja wajib *kerig aji*.⁶ Para pekerja ini tidak dibayar tetapi Kompeni wajib menyediakan makanan bagi mereka. Proyek pembangunan ini berlangsung sangat lama, sekitar 25 tahun. Pada tahun 1785 benteng tersebut sudah dinyatakan selesai dan diresmikan oleh Johannes Siberg yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa.⁷

Ketika benteng ini selesai, VOC memberi nama Rustenburg atau tempat beristirahat (*rusten*) sehingga dikenal sebagai 'benteng peristirahatan'⁸. Bangunan ini terbuat dari kayu jati yang disetorkan oleh Kesultanan Yogyakarta dari hutan-hutan jati di Gunung Kidul dan Madiun. Di dalam benteng ini ditempatkan suatu pasukan VOC berkekuatan kurang lebih 100 orang tentara di bawah pimpinan seorang kapten atau letnan. Tugas mereka adalah untuk melindungi kompleks kraton dari serangan luar, tetapi pada kenyataannya mereka lebih banyak melindungi kepentingan VOC di Yogyakarta.

Setelah Fort Rustenburg berdiri, pimpinan pemerintahan VOC di Yogyakarta kala itu, yaitu Residen Van Rhijn tinggal di dalam benteng itu. Sementara itu, berbeda dengan benteng VOC di Batavia, penduduk sipil

⁵ Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 oleh Sultan Hamengku Buwono (HB) I dari Yogyakarta, Sunan Paku Buwono (PB) III dari Surakarta, dan Nicolaas Hartingh sebagai Komisaris Kompeni untuk urusan Mataram. Berdasarkan perjanjian ini Kerajaan Mataram dibagi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan HB I dan Kesunanan Surakarta di bawah PB III (Rouffaer 1917: 588).

⁶ *Kerig aji* pada mulanya dilakukan di *tanah pangrembe*. Tanah ini adalah tanah yang khusus disediakan untuk kebutuhan pribadi raja dan keluarganya. Jadi dapat dikatakan bahwa tanah *pangrembe* adalah tanah apanase pribadi raja. Di samping hasil bumi (*pajeg pameton*), penggarap juga wajib menyumbangkan tenaga kerja bagi kepentingan pribadi raja. Proyek pribadi ini disebut *kerig aji* (bekerja untuk raja). Dalam penggunaan lebih lanjut, istilah ini banyak dipakai peneliti asing untuk menyebut kerja di tanah apanase lain yang bukan milik raja (Soerojo 2000: 24).

⁷ Pembangunan benteng yang memerlukan waktu sangat lama ini disebabkan oleh hambatan yang diciptakan R.M. Sundoro, putra mahkota Kesultanan Yogyakarta. Setelah pengaduan Jan Greeve kepada Sultan HB I pada tanggal 6 Agustus 1785 dan Sundoro diperingatkan, pembangunan benteng kembali berjalan lancar dan akhirnya berhasil diselesaikan (Ricklef 1974: 278-283).

⁸ Lihat Gill 1996: 125.

Eropa yang berjumlah sedikit tinggal di sekitar benteng. Van Rhijn berhasil meminta tanah kepada Sultan HB I yang terbentang antara benteng dan sungai Opak sebagai tempat perumahan orang-orang Eropa. Setelah Sultan HB I mengizinkan penyediaan tanah tersebut, pembangunan perumahan orang-orang Eropa dibuka di lokasi tersebut. Karena letaknya di sebelah selatan benteng, orang-orang Jawa menyebut kompleks pemukiman Eropa ini dengan istilah Kidul Loji (sebelah selatan benteng).

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintahan VOC digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1808 Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memegang pemerintahan di Jawa. Atas instruksinya, pemerintahan Eropa di pusat-pusat kerajaan Jawa harus diperkuat baik secara fisik maupun secara nonfisik. Secara fisik, Daendels memperkuat kehadiran kekuatan Eropa dengan mengerahkan pasukan. Sementara itu secara nonfisik Daendels membuat peraturan yang meningkatkan wibawa pemerintah Belanda di mata raja-raja Jawa.⁹

Dalam upaya mewujudkan kekuatan politik Eropa di Vorstenlanden, Daendels memerintahkan pembangunan rumah residen. Residen diubah menjadi *minister* sebagai wakil pemerintah Belanda. Sesuai dengan kedudukannya, Daendels mengeluarkan instruksi agar *minister* tidak tinggal lagi di dalam benteng. Untuk itu, harus dibangun sebuah kompleks rumah yang megah dan luas agar setara dengan status *minister*. Lokasi yang dipilih adalah sebuah lahan tepat di depan benteng Rustenburg. Bangunan tersebut dijadikan bukan hanya sebagai tempat tinggal *minister* tetapi juga sebagai tempat menginap Gubernur Jenderal bila berkunjung ke Yogyakarta. Pasukan yang berada di dalam benteng Rustenburg juga disertai tanggungjawab untuk menjaga keselamatan *Minister*.

Di bidang pertahanan Daendels juga memperkuat posisi pasukan. Benteng Rustenburg yang terbuat dari kayu tidak lagi layak untuk menjadi simbol kekuatan militer pemerintah Belanda. Atas instruksinya, benteng itu diubah menjadi bangunan batu dengan bentuk segi empat. Pada setiap sudutnya dibangun sebuah kubu tempat penjagaan para petugas jaga dengan lubang menembak. Benteng baru ini dibangun lebih tinggi dan dindingnya lebih tebal. Fungsinya adalah untuk bisa mengawasi tidak hanya lingkungan sekitar benteng tetapi juga dapat langsung melihat kompleks kraton Yogyakarta. Secara strategis, benteng ini bisa menjadi ancaman bagi kraton Yogyakarta karena meriam-meriam yang ditempatkan di dalam benteng bisa diangkat ke atas dengan jangkauan tembak mencapai bagian dalam kraton. Oleh Daendels, benteng ini diganti namanya dengan nama Vredeburg (benteng perdamaian). Karena fungsinya untuk melindungi dan menghormati pejabat sipil yang tinggal di depannya. Vredeburg dibangun menghadap ke rumah dinas *minister*, dan tidak mengarah ke kraton Yogya. Di sekeliling benteng terdapat parit saluran air. Fungsi pembuatan parit ini adalah untuk saluran pembuangan air dari dalam benteng sekaligus menjadi pencegah musuh yang akan mendekat dan menyerang benteng. Sebagai penghubung antara jalan

⁹ Anonim 1896: 81-82.

raya dan benteng dibangun sebuah jembatan angkat, yang dapat diangkat naik sebagai penutup pintu benteng pada malam hari.

Dengan dibangunnya benteng dan rumah *minister*, yang kemudian dijadikan sebagai rumah residen (Gedung Agung sekarang), perubahan terjadi pada konsep kosmologi dalam tata ruang ibukota kerajaan Jawa (Kuthorojo). Kompleks kraton Yogyakarta dibangun atas dasar poros yang dianggap sakral antara utara dan selatan. Ini menghubungkan titik Gunung Merapi di utara dan laut selatan di pantai selatan. Di tengah poros ini terletak kraton Yogya. Sebagai titik simbolis yang menghubungkan keduanya adalah tugu yang dibangun tepat di tengah poros kosmologi tersebut. Seluruh kompleks tata ruang ini melambangkan raja Yogyakarta sebagai penguasa alam semesta, yaitu menguasai darat dan laut.

Rancangan pembangunan rumah *minister* dan benteng Vredeburg menciptakan poros baru yang melintang dan memotong poros utara-selatan. Kedua bangunan kolonial ini terletak pada poros ekologi kolonial antara timur dan barat, yaitu antara aliran sungai Progo dan aliran sungai Opak. Kedua sungai ini menjadi wilayah dalam konsep pertahanan teritorial yang akan mendominasi wilayah pertahanan kolonial di pedalaman Jawa. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memanfaatkan jalan yang terbentang dari arah barat (Kauman) menuju timur (Semaki) sebagai jalan utama untuk pengiriman pasukan.

Dengan demikian, benteng yang dibangun oleh penguasa kolonial Belanda di kota Yogyakarta tidak hanya menandai kehadiran suatu kekuatan militer Eropa tetapi juga menjadi awal dari pelanggaran terhadap tata ruang kota sebagai pusat kraton Jawa. Dengan adanya bangunan-bangunan kolonial yang semakin banyak di kota Yogyakarta, konsep kosmologi Jawa yang diterapkan oleh Sultan HB I mengalami pergeseran meskipun tidak sebesar di Surakarta.

Sejak berakhirnya Perang Diponegoro tahun 1830, benteng Vredeburg mengalami pengembalian fungsi. Fungsi politik dan militer yang menyatu sebagai bangunan pertahanan masa VOC terpisah menjadi fungsi militer murni. Fungsi politik bangunan kolonial di kota Yogyakarta semakin banyak diambil alih oleh rumah residen di depan benteng dan kemudian setelah tahun 1870 di kantor residen, yang terletak di Jalan Malioboro (gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang). Bersama dengan kompleks Kepatihan Yogyakarta, ketiga bangunan ini ikut menentukan dinamika kehidupan politik Kesultanan Yogyakarta dan wilayah administratif (Karesidenan dan kemudian Ti pada zaman pendudukan Jepang). Ini berlangsung terus sampai masa revolusi, ketika pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada akhir tahun 1945. Bekas rumah residen Yogyakarta kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lebih dikenal sebagai Gedung Agung atau istana kepresidenan Republik Indonesia di Yogyakarta.

2 FORT ROTTERDAM DI MAKASSAR

Bangunan benteng ini seratus tahun lebih lama usianya bila dibandingkan Fort Vredeburg di kota Makassar. Berbeda dengan Vredeburg, infrastruktur kolonial ini dibuat bukan sebagai hasil dari perundingan tetapi sebagai akibat dari suatu peperangan besar yang dilancarkan oleh VOC terhadap sebuah kerajaan pribumi terbesar di Sulawesi Selatan pada pertengahan abad ke-17, yaitu kerajaan Gowa.



Gambar 2. Pintu gerbang Fort Rotterdam di Makassar, Foto koleksi KITLV (www.kitlv.nl foto nomor 15258) (kiri), dan pintu gerbang Fort Marlborough Bengkulu (foto koleksi pribadi penulis) (kanan).

Keberadaan benteng Rotterdam di Makassar tidak bisa dipisahkan dari kehadiran pertama VOC sebagai suatu badan usaha di Sulawesi Selatan. Sejak tahun 1615 penguasa Kerajaan Gowa saat itu Karaeng Matoaya telah memberi izin kepada orang-orang Belanda untuk datang dan berdagang di pelabuhan Kerajaan Gowa, Jung Pandang.¹⁰ Ini merupakan bagian dari kebijakan Kerajaan Gowa yang membuka bandarnya untuk dikunjungi oleh semua pedagang asing yang bermaksud melakukan transaksi niaga di wilayahnya. Dengan mengandalkan lokasinya yang strategis dan potensi alamnya yang menguntungkan, Kerajaan Gowa tampil sebagai suatu kekuatan maritim yang dominan dalam panggung politik dan ekonomi perdagangan kawasan itu selama abad 16-17. Bahkan bandarnya yang terkenal di Jung Pandang (Makassar) menjadi pintu gerbang utama keluar dan masuknya semua komoditi niaga seluruh kawasan Timur kepulauan Hindia.¹¹

Sebagai pusat perekonomian dan keramaian di kawasan itu, para pedagang yang aktif terlibat dalam transaksi tidak hanya terbatas pada pedagang domestik melainkan juga para pedagang asing seperti orang-orang Portugis, Cina, Inggris, Arab, Denmark, Prancis, dan akhirnya Belanda. Berbeda dengan orang-orang asing lainnya, orang Belanda datang ke Makassar bukan dalam

¹⁰ Sutherland 2004: 99.

¹¹ Knaap dan Sutherland 2004: 88. Pelabuhan ini dilindungi oleh benteng Somba Opu di sebelah selatan dan benteng Tallo di sebelah utaranya. Letaknya di muara sungai Tallo.

penampilannya sebagai pedagang individu melainkan sebagai suatu kongsi dagang yang sudah memiliki kekuatan dan infrastruktur memadai, dengan jaringan kantor-kantor dagangnya dari Jawa hingga Maluku. Dengan aktivitas perdagangannya yang bertumpu pada monopoli rempah-rempah, VOC memiliki kepentingan untuk mempertahankan posisi istimewanya khususnya di wilayah produsen. Hal ini tentu saja menimbulkan konflik kepentingan dengan Kerajaan Gowa yang menghendaki VOC sebagai pusat perdagangan rempah seluruh kawasan timur Hindia.

Persaingan dagang ini semakin memanas ketika tingkat kepentingan masing-masing pihak semakin tinggi. Orang-orang Belanda yang tinggal di Makassar jumlahnya semakin banyak. Jika pada mulanya mereka hanya terbatas dalam jumlah kecil dan tinggal di sebuah loji kecil yang dibangun di tepi sungai Tallo, tiga dekade kemudian jumlah mereka semakin meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah orang Belanda ini, mereka membangun suatu kompleks perumahan di sekitar loji VOC. Pada akhir tahun 1650-an orang-orang Belanda ini mulai membentengi rumah mereka dengan bangunan benteng sederhana yang terbuat dari bahan bambu. Bentuk benteng itu lebih mirip dengan pagar keliling yang memisahkan kompleks pemukiman Belanda ini dari lingkungan sekitarnya.¹² Tujuan pembangunan tersebut adalah untuk melindungi mereka dari tindak penyerangan dan perampokan yang sering dilakukan oleh para perompak pribumi terhadap pemukiman orang asing.

Dekade tahun 1660-an ditandai dengan puncak konflik antara VOC dan Kerajaan Gowa. Sultan Hasanuddin yang menggantikan Karaeng Patingaloang sebagai Raja Gowa bertekad untuk menolak tuntutan VOC agar mengizinkan penerapan monopoli dagang VOC di Makassar dan menghentikan peran Makassar dalam perdagangan rempah di Hindia. Peperangan yang dimulai pada tahun 1664 ini berlangsung selama lima tahun, dengan sekali terhenti pada tahun 1667. Pada tahun 1667, perundingan perdamaian diadakan antara Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowa dan Cornelis Speelman yang menghasilkan Perjanjian Bongaya. Meskipun dua tahun kemudian peperangan berkobar kembali secara singkat, Perjanjian Bongaya tidak mengalami perubahan dan tetap dijadikan dasar bagi hubungan antara VOC dan raja-raja pribumi di Sulawesi Selatan.

Salah satu pasal dari Perjanjian Bongaya adalah bahwa semua benteng yang ada di wilayah Kerajaan Gowa harus dirobohkan. Sebaliknya VOC membangun sebuah benteng baru di muara sungai Tallo. Benteng ini kemudian diberi nama Fort Rotterdam, sesuai dengan kota kelahiran Cornelis Speelman. Fort Rotterdam menjadi satu-satunya benteng yang dibangun di Makassar pada abad 17-18 dan menjadi simbol hegemoni VOC di wilayah Sulawesi Selatan. Bentuk benteng ini adalah segi lima dengan bagian belakang menjorok sementara bagian depan yang menghadap ke laut tampak datar. Dari segi lima ini, Fort Rotterdam tampak menyerupai kura-kura ketika dilihat dari udara, sehingga oleh penduduk setempat benteng ini sering disebut

¹² Knaap dan Sutherland 2004.:88. Pada tahun 1662 utusan VOC dari Ambon ke Batavia yang singgah ke Makassar, Abraham Verspreeet melaporkan telah melihat suatu kompleks pemukiman orang Belanda yang dikelilingi dengan bangunan pagar tinggi.

sebagai “benteng kora-kora”.¹³

Sejak pertengahan kedua abad ke-17, Fort Rotterdam tidak hanya menjadi pusat pertahanan yang harus melindungi kepentingan VOC dan menjadi kekuatan militer asing di Makassar, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan. Lima orang *koopman* di bawah pimpinan seorang Opperkoopman diangkat oleh penguasa VOC di Batavia untuk mengontrol dan memegang pemerintahan atas wilayahnya di Sulawesi Selatan. Perintah-perintah dikeluarkan dari benteng ini kepada semua pegawai VOC di tingkat bawah di Makassar dan juga semua instruksi dari Batavia kepada raja-raja pribumi di Sulawesi Selatan. Orang-orang yang dianggap menjadi ancaman bagi kepentingan VOC, ditangkap baik dari kalangan bangsawan maupun orang biasa. Mereka dibawa ke benteng ini untuk diadili dan dijatuhi hukuman. Untuk menegaskan kekuasaannya, penguasa VOC di Batavia memandang perlu memperkuat benteng ini dengan sejumlah pasukan yang memiliki potensi untuk mempertahankan dominasinya. Antara 800 dan 900 orang pegawai VOC baik sipil maupun militer ditempatkan di benteng ini.

Ketika jumlah aparat yang ada semakin tidak memadai untuk mengimbangi peningkatan kepentingan VOC di Sulawesi Selatan, bersamaan pula dengan meluasnya kepentingan VOC di wilayah Kerajaan Gowa, benteng Rotterdam tidak lagi memungkinkan untuk menampung mereka. Penduduk sipil dan sebagian anggota pasukan yang ditempatkan di dalam benteng tidak lagi tertampung di ruangan yang layak sebagai tempat tinggal mereka. Demikian pula dengan budak-budak yang dipelihara oleh para pejabat VOC di Makassar dan keturunannya dari hasil perkawinan mereka dengan penduduk pribumi. Atas seizin penguasa di Batavia, wilayah di sekitar benteng Rotterdam dibuka untuk pemukiman orang-orang sipil Eropa. Kompleks perkampungan yang baru dibangun pada akhir abad ke-17 ini disebut Vlaardingen, seperti kompleks perkampungan di kota Amsterdam.¹⁴

Para penghuni Vlaardingen ini adalah orang-orang Eropa atau keturunannya. Dalam kompleks pemukiman ini, para penghuninya mengembangkan gaya hidup dan budaya Eropa. Mereka membangun rumah yang mirip dengan model rumah di Eropa tetapi dengan lahan yang lebih luas untuk menampung budak-budak mereka. Sebagai suatu bangunan simbol budaya Eropa, pada abad ke-19 di kompleks pemukiman Vlaardingen berdiri sebuah *Societeit* yang disebut De Harmonie. *Societeit* ini merupakan tempat berkumpul dan bercengkerama yang menunjukkan nuansa kehidupan seni dan sosial masyarakat Eropa.

Pada peralihan abad 17-18, suatu kompleks pemukiman baru muncul di sekitar benteng Rotterdam. Kompleks ini dihuni oleh orang-orang pribumi yang menjadi pegawai rendahan VOC. Di antaranya mereka adalah orang-orang Melayu, orang Buton, orang Ternate, dan orang Mestizo serta orang Cina. Mereka tinggal di sebelah selatan Fort Rotterdam yang dikenal sebagai

¹³ Knaap dan Sutherland 2004: 17. Pada awal abad ke-19 untuk memperkuat posisi benteng ini, pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah kubu yang disebut Vredenburg di belakang Rotterdam.

¹⁴ Sutherland 1986: 41-42.

kompleks Kampung Baru. Nama ini diambil dari istilah Melayu untuk menunjukkan anggota yang bermukim di tempat tersebut. Pada tahun 1698 komunitas ini terbentuk di bawah pimpinan mereka masing-masing yang bersepakat untuk menjalin kehidupan sosial bersama dan mencegah konflik.¹⁵

Ketiga kompleks ini, Fort Rotterdam, Vlaardingen, dan Kampung Baru memberikan warna baru dalam kehidupan sosial di Makassar sejak akhir abad ke-17. Dengan lokasinya yang terletak di jalan masuk kota Makassar, ketiganya mengontrol potensi perekonomian dan kekuatan politik Makassar dan sekitarnya. Sebaliknya, ketiganya menjadi simbol dominasi VOC terhadap raja-raja pribumi khususnya di sekitar kota Makassar. Fort Rotterdam menjadi simbol kekuatan militer VOC, Vlaardingen menjadi simbol hegemoni budaya Barat di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat pribumi dan Kampung Baru merupakan model masyarakat plural (*plural society*) produk kekuasaan kolonial di Timur.

Berbeda dengan Fort Vredeborg di Yogyakarta yang murni merupakan kekuatan militer dan politik VOC sepanjang abad 17-18, Fort Rotterdam tidak hanya menjadi pusat kekuatan militer dan politik asing tetapi juga menjadi simbol monopoli dan eksploitasi ekonomi VOC atas Makassar. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Fort Rotterdam berfungsi sebagai pengontrol perdagangan dan transaksi ekonomi yang menjadi penopang utama kehidupan dan eksistensi raja-raja pribumi di masa lalu. Dari benteng ini, VOC memungut bea dan cukai semua komoditi ekspor dan impor. Kecuali itu, kekuatan militer VOC juga menerapkan kontrol yang ketat terhadap arus perdagangan yang keluar dan masuk Makassar. Semua komoditi yang menjadi hak monopoli VOC dilarang diperdagangkan tanpa seizin para pejabat VOC di benteng ini. Jika hal ini dilanggar, produk niaga yang dilarang akan disita dan ditimbun di dalam benteng. Oleh karena itu, di dalam benteng sebelum adanya kampung-kampung baru itu terbentuk suatu pemukiman sosial bagi kebutuhan jasmani dan rohani para penghuni benteng. Di dalam benteng ini, VOC bukan hanya membangun infrastruktur yang digunakan untuk memenuhi kepentingan ekonominya, tetapi juga menyediakan prasarana ibadah bagi para pejabat dan pegawai VOC. Kecuali itu juga terdapat ruang untuk mengadili, memenjarakan dan menyiksa para tahanan yang dibawa ke benteng. Hal ini membuktikan fungsi benteng adalah sebagai penopang kekuasaan politik dan hukum VOC pada masa itu.

Dari kompleks Fort Rotterdam ini, bersama Vlaardingen dan Kampung Baru, perlahan-lahan perluasan kota yang baru mulai terjadi. Jika kota lama di Makassar lebih terfokus pada pusat kerajaan Gowa, sejak abad ke-18 pusat gravitasi kehidupan kota bergeser ke lokasi di sekitar benteng Rotterdam. Bersamaan dengan perluasan dan pembangunan baru yang bersumber dari benteng, Makassar tumbuh menjadi kota dengan tata ruang kolonial. Bentuk tata ruang kota Makassar ditentukan melalui pusat gravitasi yang menentukan kehidupan masyarakatnya. Ketika sebelumnya pusat perekonomian menjadi

¹⁵ Noorduyn 2000: 474.

sentra perluasan kota, perlahan-lahan konsep ini bergeser. Sentra bagi pengembangan kota terbentuk dari pusat administrasi pemerintahan, lengkap dengan kompleks perkantoran dan lapangan di depannya. Di samping itu, tata ruang kota kolonial di Makassar juga ditandai dengan pembagian lokasi pemukiman dan pola pemukiman dari masing-masing etnis yang membentuk masyarakat kolonial. Semua etnis ini saling dipisahkan secara tegas dan berada di bawah kontrol yang ketat melalui pemimpin mereka masing-masing.

Bersamaan dengan bergesernya pusat perkembangan kota Makassar dari pinggiran, yaitu komplek Fort Rotterdam, menuju pedalaman khususnya kantor residen dan kemudian kantor Gubernur Celebes en Onderhoorigheden, fungsi benteng itu juga semakin berkurang. Potensinya sebagai kekuatan militer mulai menurun seiring dengan bergesernya strategi pertahanan dari pertahanan maritim ke pertahanan teritorial. Setelah perang Bone tahun 1825, sistem pertahanan kolonial tidak lagi terpusat di Fort Rotterdam tetapi bergeser di barak-barak dan bivak-bivak militer. Sistem ini dianggap lebih efektif untuk melakukan ekspedisi militer terhadap raja-raja pribumi yang tidak patuh terhadap pemerintah kolonial. Hal ini disebabkan oleh strategi ofensif yang diterapkan pemerintah Belanda daripada strategi defensif seperti yang digunakan oleh raja-raja pribumi. Dengan strategi ofensif pasukan lapangan, fungsi benteng semakin berkurang.

3 FORT MARLBOROUGH DI BENGKULU

Benteng ketiga yang dipilih sebagai kajian di sini adalah Fort Marlborough. Berbeda dengan Vredenburg dan Rotterdam, Fort Marlborough dibangun oleh Kompeni India Timur (EIC) pada awal abad ke-18, atau tepatnya tahun 1714.



Gambar 3. Benteng Marlborough dan jembatan permanen sebagai pengganti jembatan angkat (foto koleksi pribadi penulis).

Seperti halnya benteng-benteng asing lainnya di Timur, kehadiran Fort Marlborough menandai kepentingan dan kekuasaan Inggris di wilayah tersebut, yaitu pantai barat Sumatra di daerah Bengkulu. Pendirian benteng ini memiliki latar belakang dan hubungan yang erat dengan perkembangan

kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi Inggris di wilayah ini.

Setelah berhasil menegakkan kekuasaannya di Calcutta pada pertengahan abad ke-17, pandangan perdagangan Inggris diarahkan ke Asia Tenggara yang pada awal abad itu memberikan pengalaman pahit bagi para pedagangnya. Melalui saluran diplomatik dan pendekatan ekonomi, para petinggi EIC berhasil mendekati para kepala adat di pantai barat Sumatra khususnya mereka yang belum ditaklukkan atau yang masih berada di bawah kontrol pengaruh VOC. Ketika kekuatan VOC berkurang atau setidaknya dialihkan dari Sumatra (kecuali Padang yang dipertahankan oleh VOC untuk melindungi dari penetrasi para pedagang EIC yang tiba dari India) ke Jawa dan Sulawesi, kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejabat EIC untuk memperkuat posisi dan pengaruh mereka di Sumatra.

Benteng ini diberi nama menurut nama seorang jenderal Inggris terkenal pada awal abad ke-17, John Churchill Duke of Marlborough. Jenderal Marlborough adalah panglima pasukan Kerajaan Inggris kepercayaan Ratu Anne yang dikirim sebagai pimpinan pasukan ekspedisi Inggris ke daratan Eropa. Ini terjadi pada tahun 1704 ketika terjadi konflik antara Raja Louis XIV dari Prancis dan Ratu Anne dari Inggris yang memperebutkan siapa yang menjadi raja di Spanyol setelah raja yang lama meninggal. Ketika kesepakatan tidak tercapai, Louis XIV menggalang kekuatan raja-raja daratan Eropa seperti Belanda, Bavaria, dan Austria untuk menghadapi Inggris. Duke of Marlborough yang datang dengan membawa 12.000 tentara ekspedisi Inggris berhasil menghancurkan pasukan gabungan itu di Blenheim (1704), Ramillies (1706), dan Oudernarde (1708).¹⁶

Pada periode yang hampir sama, akhir abad ke-17 permusuhan antara Inggris melawan Belanda dan Prancis juga dilancarkan di bagian dunia lainnya. Di India, peperangan itu berlangsung dalam bentuk perebutan koloni. Kondisi ini menyebar hingga ke Sumatra dan Jawa. Perebutan ruang pengaruh telah terjadi antara kongsi dagang EIC dan VOC di pantai barat Sumatra sejak pertengahan abad ke-17. Setelah Belanda berhasil menegakkan pengaruhnya pada tahun 1685 di Pariaman, beberapa pedagang Inggris mulai merasa perlu untuk mencari tempat yang layak sebagai pangkalan mereka. Tujuan mereka adalah untuk bisa membeli dan mengekspor lada dari Banten, mengingat lada dari Sumatra Barat tidak lagi mungkin dilepaskan dari monopoli Belanda. Mereka meminta bantuan pangkalan EIC di Madras agar mengirimkan pasukan untuk menduduki sebuah tempat di antara Banten dan Sumatra Barat. Pada tahun 1686 EIC berhasil menguasai daerah Silebar, di dekat Bengkulu. Sejak itu Silebar dijadikan pangkalan oleh mereka demi kepentingan perdagangan lada.¹⁷

Dari Silebar aktivitas perdagangan orang-orang Inggris mulai meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Mereka tidak lagi terbatas pada lada tetapi juga pada produk agraria dan hasil hutan yang lain. Pada tahun 1701

¹⁶ *The New Encyclopaedia Britannica* (Chicago, Encyclopaedia Britannica) 2002: 861-862. Kemenangan tersebut menjadikan reputasi Duke of Marlborough sebagai Jenderal Inggris terbesar sampai masa peperangan Napoléon.

¹⁷ Marsden 1975: 451.

orang-orang Inggris ini telah mulai melakukan pelayaran menyusuri sungai Bengkulu untuk mengumpulkan produk hutan sampai ke pedalaman. Dari aktivitas ini, mereka mulai melakukan interaksi dengan penduduk yang bermukim mulai dari Ayer Bangis di dekat Padang sampai ke selatan Tallo, dekat Manna. Ketika transaksi perdagangan mereka semakin besar, para pejabat EIC di Calcutta menilai perlunya membangun suatu pangkalan di Bengkulu. Untuk itu mereka sepakat memilih sebuah lokasi yang tepat dengan tujuan tidak hanya strategis secara ekonomi tetapi juga mampu mengontrol wilayah sekitarnya. Hal ini penting tidak hanya untuk memperluas aktivitas ekonomi lebih lanjut tetapi juga untuk melindungi kepentingan Inggris di daerah Bengkulu.¹⁸

Akhirnya pada tahun 1714 peletakan batu pertama pendirian pangkalan dimulai. Berdasarkan pertimbangan fungsi pangkalan tersebut, lokasi yang dipilih adalah dua atau tiga mil dari muara sungai Bengkulu dan berada di tepi pantai. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa muara sungai Bengkulu mengalami pengendapan lumpur sehingga sulit bagi kapal-kapal besar untuk merapat di dermaganya. Di samping itu, tanah yang dipilih terletak lebih tinggi daripada sekitarnya sehingga bisa memantau semua wilayah tersebut. Dalam proses pembangunannya, para pejabat EIC meminta bantuan penduduk pribumi setempat. Pada tahun 1719 benteng Marlborough selesai dan berfungsi tidak hanya menjadi pusat pemukiman tetapi juga menjadi pangkalan pertahanan militer Inggris, khususnya untuk menghadapi ancaman orang-orang Belanda. Benteng ini dibuat dari batu karang yang dikelilingi dengan parit untuk aliran air. Fungsinya adalah untuk pembuangan aliran air dari dalam benteng sekaligus untuk mempersulit lawan mendekati benteng ini. Untuk menghubungkan benteng dengan daratan, sebuah jembatan angkat dipasang di pintu gerbang utama dan diangkat pada saat malam hari. Sebagai kekuatan utama benteng ini, pada dindingnya dibuat lubang-lubang mengarah keluar untuk mengarahkan moncong meriam. Arah pertahanan utama benteng ini adalah menghadap ke laut, dengan asumsi bahwa musuh utama akan datang dari laut dengan armadanya. Ini berarti bahwa para perancang benteng tersebut menduga bahwa lawan utama mereka adalah kekuatan yang memiliki armada laut besar, yakni ini VOC atau armada Prancis dari India.

Penguatan terhadap benteng terus dilakukan oleh EIC, yaitu dengan penambahan jumlah pasukan. Secara administrasi, Fort Marlborough dikontrol oleh komandan benteng Fort George di Penang dan penambahan pasukan sering dilakukan dari sana. Sebagai akibatnya, lokasi benteng diperluas dengan membangun tempat pemukiman di sekitarnya. Pada pertengahan abad ke-18 jumlah kekuatan pasukan yang diperbesar menuntut penambahan gudang amunisi. Gudang amunisi yang dibangun mampu menampung empat ratus barel serbuk amunisi. Bagi Inggris, ketika arti strategis Bengkulu semakin meningkat, Dewan EIC di Calcutta memutuskan pada tahun 1802 untuk meminta izin kepada Parlemen Inggris di London

¹⁸ Marsden 1975: 452.

agar Fort Marlborough ditingkatkan statusnya dan langsung dikontrol oleh pusat. Parlemen Inggris menyetujui dan sejak itu Fort Marlborough mewakili kepentingan Inggris secara langsung di seluruh Hindia Timur dan tunduk kepada komandan benteng Fort William di Bengala.¹⁹

Akan tetapi fungsi Fort Marlborough sebagai pusat pertahanan berkurang, walaupun sebagai pangkalan perdagangan meningkat. Ketika pada tahun 1803 Dewan EIC memutuskan untuk menjadikan Fort Marlborough sebagai pusat penimbunan rempah-rempah Inggris di seluruh Hindia Timur, nilai strategis militernya dialihkan ke pangkalan Inggris di Penang. Hal ini semakin terasa ketika setahun kemudian pangkalan Belanda di Malaka berhasil direbut oleh Inggris. Ini semua terjadi dalam rangka persiapan penyerangan Inggris terhadap koloni Belanda di Jawa sebagai dampak peperangan di Eropa.²⁰

Selama masa dominasi Inggris di Hindia Timur sampai dengan Kongres Wina tahun 1815, Fort Marlborough tidak memegang peranan lagi. Makna strategisnya tenggelam dibandingkan pangkalan Inggris di Jawa dan Penang. Setelah Jawa dikembalikan kepada Belanda tahun 1816, tidak otomatis Fort Marlborough meningkat kembali nilainya. Ketika pada tahun 1818 Raffles diangkat menjadi Gubernur Bengkulu, Fort Marlborough mulai kembali menunjukkan nilainya. Ambisi Raffles untuk memulihkan kekuasaan Inggris di Hindia Timur dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan raja-raja dan para penguasa pribumi di Sumatra untuk melawan Belanda. Hal ini menyebabkan dijadikannya kembali Fort Marlborough sebagai pangkalan utama.

Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1819 Raffles berhasil memperoleh Pulau Tumasik dari Sultan Kedah yang kemudian dibangunnya menjadi bandar laut Singapura.²¹ Tujuan utama Raffles adalah untuk menyaingi dan akhirnya mematikan pangkalan laut Belanda di Batavia dengan menutup pelayaran Selat Malaka. Sejak itu, perhatian Raffles tidak tertuju lagi ke Bengkulu, meskipun ia masih menjabat di sana sampai menjelang penyerahannya kepada Belanda berdasarkan kesepakatan Traktat London tahun 1824.²²

Ketika Belanda mulai memerintah Bengkulu, wilayah ini dijadikan sebagai wilayah karesidenan. Sebagai kepala daerah, Gubernur Jenderal Van der Capellen pada tahun 1824 mengangkat seorang residen. Residen Belanda ini tidak lagi tinggal di Fort Marlborough tetapi membangun sebuah rumah dinas di depan benteng tersebut. Dengan langkah ini, status Fort Marlborough semakin terbatas fungsinya, tidak lagi sebagai infrastruktur keamanan setempat. Nilai strategis benteng sebagai infrastruktur pertahanan terhadap serangan lawan dari luar semakin berkurang, mengingat setelah Perang Padri tahun 1837 pemerintah Belanda lebih memusatkan perhatian di Sumatra Barat. Di Bengkulu, kekhawatiran Belanda lebih ditujukan pada lawan-lawan

¹⁹ Marsden 1975: 452.

²⁰ Norman 1858: 11. Malaka tidak termasuk wilayah yang wajib dikembalikan kepada Belanda menurut Perjanjian Amiens tahun 1802.

²¹ Sweet 2002: 66.

²² Stapel 1940: 207.

pribumi yang dianggap merintang kebijakan monopoli cengkih dan kopi, serta ketika dimulainya eksploitasi tambang emas di Manna.

Fort Marlborough yang cukup besar dan luas sebagai benteng tempur tidak lagi dihuni oleh kekuatan pasukan yang besar. Di zaman pemerintahan kolonial Belanda jumlah garnizun yang menempati benteng ini tidak banyak, dan tidak sesuai dengan besarnya benteng ini. Meskipun Inggris pernah merencanakan benteng ini sebagai suatu pangkalan besar, Fort Marlborough tidak pernah terlibat dalam suatu peperangan baik dalam menghadapi serangan darat maupun laut. Kondisi ini mengakibatkan bentuk fisik benteng itu tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan hanya terjadi pada model yang direnovasi menurut keinginan para pejabat Belanda. Sebaliknya di dalam benteng sendiri terdapat fungsi baru, yaitu ditemukannya beberapa makam dari orang-orang Inggris dan keluarganya yang pernah tinggal atau menjabat di benteng itu. Sampai sekarang bangunan ini tidak memiliki fungsi yang berarti, sangat kontras dibandingkan bekas rumah residen di depannya yang tetap masih berfungsi sebagai pusat pemerintahan Propinsi Bengkulu.

PENUTUP

Di atas telah dibahas sekilas tentang bentuk, lokasi, dan sejarah tiga benteng yang masing-masing diambil sebagai sebuah studi kasus untuk mengamati strategi pertahanan kolonial di masa lalu. Benteng-benteng ini masing-masing memiliki keunikan tersendiri baik dari latar belakang, usia maupun kedudukannya di antara lingkungan sekitarnya. Ketiganya juga memiliki suatu kesamaan walaupun dibangun oleh penguasa yang berbeda dan pada kurun waktu yang hampir sama. Kesamaan yang jelas mencolok di sini adalah bahwa benteng-benteng tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk melindungi dan mendukung penegakan kepentingan penguasa kolonial, baik terhadap raja-raja pribumi maupun terhadap kekuatan asing lainnya. Dengan melihat tujuan tersebut, aspek pertahanan dan kekuatan jelas menjadi prioritas utama. Di samping itu, juga nilai strategis lokasi benteng menunjukkan kesamaan, tergantung pada tujuan utama pembangunan itu. Benteng yang digunakan untuk menopang kepentingan ekonomi kolonial dibangun di lokasi yang strategis bagi perekonomian, seperti tepi laut, muara sungai atau di lintasan arus lalu-lintas ekonomi utama. Sebaliknya, benteng yang digunakan untuk mendukung tujuan politik kolonial akan lebih mempertimbangkan lokasi strategis politis atau militer, seperti di depan kraton atau di dataran tinggi.

Ketika bangunan benteng dikaitkan dengan perkembangan kota tempat benteng itu berada, posisinya tergantung pada arah mana pengembangan kota tersebut ditempuh. Ketika kota itu lebih mengarah pada pengembangan ekonomi yang seiring dengan tujuan pembangunan benteng, posisi dan nilai benteng itu akan tetap tinggi. Fort Rotterdam di Makassar akan tetap bernilai strategis bagi pariwisata mengingat Makassar berkembang sebagai kota niaga yang penting di kawasan timur Indonesia. Dengan mengandalkan pada sektor perdagangan maritim yang bertumpu pada ekspor-impor, pelabuhan laut Makassar akan tetap menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan

utama. Fort Rotterdam akan menjadi logo utama bagi para pendatang yang masuk kota Makassar khususnya melewati jalur laut. Gravitasi keramaian dan kehidupan kota di pelabuhan memungkinkan benteng ini untuk tetap dijadikan andalan bagi pengembangan pariwisata setempat.

Hal serupa dialami oleh Fort Vredeborg. Ketika Yogyakarta dikembangkan sebagai kota budaya dengan status daerah istimewanya, kraton dan kompleks di sekitarnya memegang status yang penting. Dengan semboyan kota budaya, kota Yogyakarta menjadi salah satu andalan pariwisata utama bagi Indonesia dan kraton menduduki posisi yang strategis. Lokasi Fort Vredeborg yang terletak di depan kraton menjadi ikut terseret di dalamnya. Benteng ini tidak bisa dilepaskan dengan kompleks kraton dan sekitarnya, sehingga menjadi suatu paket kunjungan pariwisata bagi kota Yogyakarta. Status dan namanya tidak akan merosot selama masih menjadi andalan pariwisata baik bagi kota Yogyakarta maupun untuk seluruh Indonesia.

Sebaliknya terjadi pada Fort Marlborough. Ketika kota Bengkulu dikembangkan ke arah yang berbeda dengan tujuan utama pembangunan benteng, meskipun lokasinya sangat strategis, Fort Marlborough tidak mampu mengikuti perkembangan daerah sekitarnya. Kota Bengkulu yang dijadikan sebagai kota administratif pemerintahan telah mengalihkan gravitasi kehidupan kotanya dari pinggiran ke pusat kota terutama di pusat pemerintahan. Karena Fort Marlborough telah kehilangan fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan, tidak ada lagi yang dapat diandalkan dan diharapkan dari benteng ini. Akibatnya, kondisi dan perawatannya tergantung pada kunjungan wisatawan dan dari perhatian Dinas Pariwisata setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1896. "Europeesche zeden op Java in Daendels' tijd", *Indische Gids* I: 81-82.
- Harrison, Brian. 1954. *South-east Asia: a short history*. London: Macmillan.
- Gill, Ronald Gilbert. 1995. *De Indische stad op Java en Madoera: een morfologische studie van haar ontwikkeling*, disertasi Universitas Teknik Delft.
- Knaap, Gerrit J. dan Heather Amanda Sutherland. 2004. *Monsoson traders: ships, skippers and commodities in eighteenth-century Makassar*. Leiden: KITLV Press.
- Marsden, William. 1975. *The history of Sumatra*. Oxford: Oxford University Press.
- Merrillees, Scott. 2000. *Batavia in nineteenth-century photographs*. Richmond: Curzon Press.
- Noorduyn, J. 2000. "The Wajorese, merchants' community in Makassar", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 3/156: 474-498.
- Norman, H.D. Levyssohn 1858. *Britsche heerschappij over Java en onderhoorigheden (1811-1816)*. 'S- Gravenhage: Gebroeders Belinfante.
- Ricklef, M.C. 1974. *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: a history of the division of Java*. London: Oxford University Press.

- Rouffaer, G.P. 1917. "De vorstenlanden", *Encyclopaedie van Nederlandsch Indië*. 'S- Gravenhage: Nijhoff.
- Soerojo, A MDjuliati. 2000. *Eksplorasi kolonial abad XIX: kerja wajib di karesidenan Kedu 1800--1890*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Stapel, W.F. 1940. *Geschiedenis van Nederlandsch Indië*. Jilid V. Amsterdam: Joost van den Vondel
- Sutherland, Heather. 1986. "Ethnicity, health and power in colonial Makassar: a historiographical reconsideration", di dalam: P.J.M. Nas (ed.), *Indonesian city: studies in urban development and planning*, hlm. 40-49. Dordrecht: Foris. (Verhandelingen 117).
- Sutherland, Heather. 2004. "Trade, court and company: Makassar in the later seventeenth and early eighteenth centuries", di dalam: Elsbeth Locher-Scholten dan Peter Rietbergen (ed.), *Hof en handel: Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720; opgedragen aan Juriën van Goor*, hlm. 88-112. Leiden: KITLV Press.
- Sweet, Michael J. 2002. *Sir Thomas Stamford Raffles*. Singapore: Antiques of the Orient.